



Pemkot Jangan Asal Cuci Tangan

YOGYA, TRIBUN - Kalangan legislatif Kota Yogyakarta berencana untuk melakukan evaluasi terkait praktik pemungutan tarif parkir yang tak rasional setiap liburan panjang di Kota Yogyakarta. Sama dengan masyarakat Yogya pada umumnya, kalangan dewan prihatin kondisi tersebut akan merusak citra Yogya sebagai kota wisata.

Anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Bambang Anjar Jahumurti menjelaskan, tarif parkir yang dinaikkan secara tidak rasional dan jelas melanggar aturan tersebut bukan sekali dua kali. Ia juga melihat praktik serupa juga terjadi pada momen-momen seperti sekatan dan event lain.

"Kami sudah mencatat hal ini. Memang, kami merencanakan akan ada evaluasi dengan dinas terkait tentang pelanggaran-pelanggaran ini," katanya kepada *Tribun*

Banyak yang melakukan aji mumpung saat momen-momen semacam liburan panjang. Namun, ini adalah ulah dari oknum jukir ilegal

Jogja, Selasa (3/1).

Bambang menjelaskan, evaluasi ini juga akan dilakukan dengan mengundang komisi lain di dewan. Harapannya, evaluasi tersebut dapat mengetahui solusi dari problem besar yang tidak terus selesai ini.

"Mungkin pekan pertama dan kedua kami akan segera membahas persoalan ini. Koordinasi ini harus dengan institusi terkait. Misal kami berkoordinasi dengan komisi B terkait dengan pendapatan asli daerah (PAD)nya," ulasnya.

Di sisi lain, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menilai Pemerintah Kota (Pemkot) tidak cukup mampu untuk mengatasi persoalan ini. Pasalnya, kejadian menaikkan tarif parkir ini terus terjadi dan selalu muncul dalam momen liburan panjang.

"Maka, kami harus mengetahui problem besarnya apa sampai tidak bisa diatasi. Apakah karena ada transisi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, saya kira tidak ada kaitannya dengan itu," urainya.

Pengawasan

Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Dinas Per-

hubungan (Dishub) Kota Yogyakarta, Wirawan Harlo Yudo mengatakan kenaikan tarif parkir di Kota Yogyakarta ini memang tidak dapat dibendung. Hal ini karena ulah dari oknum juru parkir (jukir) ilegal yang memenuhi kantong parkir liar.

"Banyak yang melakukan aji mumpung saat momen-momen semacam liburan panjang. Namun, ini adalah ulah dari oknum jukir ilegal," ulasnya.

Wirawan juga menambahkan, adanya parkir liar ini tak lain karena terbatasnya kantong parkir yang disediakan oleh Pemkot. Sehingga, muncul kantong parkir liar yang memakan trotoar jalan, dan juga depan rumah warga.

Terkait dengan alasan yang menyebut bahwa tarif tak rasional tersebut dilakukan oleh juru parkir ilegal, sejumlah netizen meman-

dang itu bukan alasan Pemkot untuk cuci tangan.

Aktivitas perparkiran diatur dengan perda yang tentu menjadi tugas dan kewenangan pemerintah

untuk menegakkan aturan tersebut.

"Jika yang melakukan bukan juru parkir resmi apa terus kemudian bukan tanggungjawab Pemkot? Ja-

ngan kemudian ingin cuci tangan dengan alasan tersebut. Ini memalukan dan merusak citra Yogyakarta," kata Aditya Diaz kepada *Tribun Jogja*. (ais)

Mahal Boleh Asal Legal

DINAS Ketertiban (Dintib) mengklaim telah melakukan tindakan tegas pada jukir nakal yang menaikkan tarif parkir di luar ketentuan. Mereka pun menyatakan telah menerima aduan dan laporan dari masyarakat terkait dengan tarif parkir yang mencekik di sejumlah kawasan Kota Yogyakarta.

Kepala Dinas Ketertiban, Nurwidihartana membenarkan jika telah menerima sejumlah aduan dan laporan terkait tarif parkir yang tinggi di Yogyakarta. Meski demikian, dia mengaku tidak hafal ada berapa aduan yang diterimanya.

"Yang pasti, sejauh ini kami telah melangkah dengan membina 45 jukir dan dua orang jukir kami sidangkan. Hal ini karena kami mendapatkan aduan dari masyarakat pada bulan Desember 2016 lalu," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah titik parkir menaikkan tarif parkir secara tidak wa-

jar. Lokasi tersebut di antaranya adalah sekitar Malioboro, Titik Nol, Alun-alun utara dan selatan, sekitar XT Square dan Gembiraloka. Praktik ini mengundang reaksi keras dari netizen yang khawatir praktik tersebut akan merusak citra pariwisata di Yogya.

Sementara itu Elanto Wijoyono, aktivis peduli lingkungan Kota Yogyakarta menilai banyak laporan atau aduan pun tidak jelas tindak lanjutnya. Sangat sedikit kasus pelanggaran parkir yang ditindak lanjuti hingga ke jalur hukum. Hal ini karena ancamannya ringan, hanya tipiring.

"Saya sebenarnya sepakat bahwa parkir kendaraan bermotor pribadi kini dan ke depan harus semakin terbatas (lokasinya) dan mahal (tarifnya). Namun, harus legal, bukan ilegal. Hal itu bukan berarti bisa dinaikkan semau gue tanpa dasar hukum/ketetapan Pemda," tegasnya. **(ais)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005